

**RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2017**

**BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
SETDA KOTA YOGYAKARTA**

2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja SKPD Tahun 2016 memuat rancangan rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sesuai dengan **Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2016 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dimaksud untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program – program satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang difokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun mengacu pada Surat Edaran Walikota Nomor 903/3376 tanggal 29 September 2016 perihal Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Sesuai Perangkat Daerah Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 .

Proses penyusunan Renja SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renja SKPD;
- b. Penyusunan rancangan Renja SKPD;
- c. Pelaksanaan Forum SKPD; dan
- d. Penetapan Renja SKPD.

Penyusunan dokumen ini pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2005 – 2025;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Disusunnya Renja Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan oleh personil organisasi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

- Tujuan

Renja 2017 ini sebagai pedoman acuan dalam penyusunan RKA 2017, DPA 2017, RKT 2017 dan Penetapan Kinerja 2017. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan pelaksanaan pengendalian pembangunan dalam mendukung terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja SKPD Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
	2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD
	2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
	2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Kegiatan Masyarakat
	2.5. Penelaah Usulan Program dan
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
	3.1. Telaah terhadap kebijakan nasional
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
	3.3. Program dan kegiatan
BAB IV	PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Tahun 2015 Bagian Pengendalian Pembangunan memiliki 6 (enam) program, yaitu

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
- f. Program Pelayanan Pengadaan

Capaian kinerja keluaran berdasarkan realisasi fisik pada masing-masing kegiatan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Program/kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)
I.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %
II.	Peningkatan Sarana dan Aparatur	100 %	100 %
III.	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	93 %	97.85 %
	a. Pengendalian Administrasi Kegiatan	100 %	100 %
	b. Penilaian & Fasilitasi Penyedia Barang/Jasa	100 %	100 %
	c. Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	100 %	100 %
	d. Pengendalian Operasional	100 %	100 %
IV.	Program Pengadaan	100 %	100 %
	a. Operasional LPSE	100 %	100 %
	b. Operasional ULP	100 %	100 %

Dari tabel di atas tampak bahwa seluruh target program kegiatan pada renja tahun 2015 sebagian besar tercapai sebesar 100%. Untuk lebih jelas capaian target renja tahun 2015 pada masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.1

2 . Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Bagian Pengendalian Pembangunan pada tahun 2015 dilihat dari capaian indikator sasaran dan indikator program Bagian Pengendalian Pembangunan tahun 2015 yang disesuaikan dengan indikator kinerja utama (IKU) Bagian Pengendalian Pembangunan.

Indikator sasaran Bagian Pengendalian Pembangunan tahun 2015 meliputi :

- Prosentase pengendalian administrasi dan pengendalian operasional kegiatan seluruh SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta
- Prosentase paket pengadaan yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien, akuntabel dan professional berbasis teknologi informasi

Sedangkan indicator program meliputi :

- Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
- Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku
- Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan professional berbasis teknologi informasi

Realisasi capaian untuk indicator sasaran terlaksananya pengendalian administrasi dan pengendalian operasional kegiatan seluruh SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta adalah 97,85 % dari target 93% sehingga capaian berhasil melampaui target. Sedangkan untuk indicator sasaran prosentase paket pengadaan yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien, akuntabel dan professional berbasis teknologi informasi realisasi capaiannya sebesar 100%. Untuk lebih detail laporan capaian kinerja pelayanan Bagian Pengendalian Pembangunan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.2.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis kinerja Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, terlihat bahwa kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan pengembangan mengingat kinerja Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta dapat mendorong kinerja SKPD lain dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun hal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan peranan Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta terhadap pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta adalah :

1. Potensi pengembangan antara lain :
 - a. Evaluasi dokumen kontrak kontruksi
 - b. Optimalisasi laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
 - d. Pengendalian perencanaan kegiatan

- e. Pengendalian kegiatan fisik konstruksi
 - f. Pengendalian kontrak kritis
 - g. Uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi
 - h. Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD.
 - i. Kajian AHS tentang Analisa Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - j. Buku saku pelaksanaan kegiatan
 - k. Evaluasi AHSP
 - l. Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini disebabkan berbagai kendala antara lain :
- a. Permasalahan sumber daya manusia
 Hasil analisis jabatan jumlah pegawai yang dibutuhkan di Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta sebanyak 66 (enam puluh enam) orang namun jumlah yang baru terpenuhi sebanyak 40 (empat puluh orang) orang termasuk 7 (tujuh) orang naban. Jumlah personil yang masih kurang dari anjab menyebabkan kinerja belum dapat optimal.
 - b. Permasalahan sarana prasarana
 Belum terpenuhinya ruang pelayanan umum, ruang kerja masih bocor, listrik masih kurang memadai dan kurang gudang penyimpanan arsip. Terbatasnya jumlah komputer dan printer yang memenuhi standar yang dibutuhkan berdampak pada pelaksanaan tugas sehari – hari.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Program kegiatan Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan mendukung misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk mencapai tujuan mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, mewujudkan prioritas pembangunan reformasi birokrasi dan tata kelola sebagaimana dalam rancangan awal RKPD. Sasaran jangka menengah yang akan dicapai adalah terwujudnya pengendalian administrasi dan operasional kegiatan serta tersedianya pedoman pengendalian kegiatan dan terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, persaingan sehat dan akuntabel.

Program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD 2017 sebagaimana Lampiran Surat Walikota Nomor 903/3376, yaitu :

1. Program Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- b. Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran
- c. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor
- b. Penyediaan dan Pemeliharaan rutin/berkala

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD

4. Program pengendalian pelaksanaan pembangunan

- a. Penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan setda
- b. Pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan
- c. Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan

Anggaran dalam rancangan awal RKPD 2017 untuk Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan sebesar Rp 1.462.283.224,- belum mencukupi untuk mewujudkan visi misi pengendalian pembangunan di tahun 2017. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan anggaran tahun 2017 untuk program pelaksanaan pengendalian pembangunan membutuhkan anggaran Rp 1.673.922.803,-.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, rencana kerja Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan nasional dan dokumen perencanaan propinsi.

Rencana kerja Bagian Administrasi dan Pengendalian pembangunan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2017. Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 disertai 9 (sembilan) agenda pembangunan (nawacita) dijadikan dasar penyusunan prioritas nasional, yaitu :

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
- Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
- Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi
- Cita 8 : Melakukan reformasi karekter bangsa
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2017 berdasarkan pada RKP Tahun 2017, terdiri dari 5 prioritas, yaitu:

- 1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- 2) Pembangunan Sektor Unggulan;
- 3) Pemerataan dan Kewilayahan;
- 4) Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan;
- 5) Pembangunan Ekonomi.

Prioritas pembangunan kota ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah DIY untuk tahun 2017, yaitu:

- 1) Sosial Budaya;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi;
- 5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
- 6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
- 7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2017 yaitu:

- 1) Sosial Budaya;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi;
- 5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
- 6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
- 7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat;
- 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat;
- 3) Harapan hidup masyarakat meningkat;
- 4) Melek huruf masyarakat meningkat;
- 5) Aksesibilitas pendidikan meningkat;
- 6) Daya saing pendidikan meningkat;
- 7) Kualitas lingkungan hidup meningkat;
- 8) Pendapatan masyarakat meningkat;
- 9) Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun;
- 10) Kemiskinan masyarakat menurun;
- 11) Ketimpangan antar wilayah menurun;
- 12) Kunjungan wisatawan meningkat;
- 13) Lama tinggal wisatawan.

Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada table berikut:

Table 1.1

Matrik Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta

No.	Nawacita	No.	Prioritas DIY	Prioritas Kota Yogyakarta	No.	Sasaran Kota Yogyakarta
1	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia	1	Social Budaya	Social Budaya	1	Kemiskinan masyarakat menurun
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	2	Kesehatan	Kesehatan	2	Harapan hidup masyarakat meningkat
3	Melakukan revolusi karakter bangsa	3	Pendidikan	Pendidikan	3	Melek huruf masyarakat menurun
					4	Aksesibilitas pendidikan meningkat
					5	Daya saing pendidikan meningkat
4	Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	4	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	6	Pendapatan masyarakat meningkat
					7	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun
5	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic				8	Kunjungan wisatawan meningkat
					9	Lama tinggal wisatawan meningkat
6	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan	5	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	10	Ketimpangan antar wilayah menurun
		6	Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang	Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang	11	Kualitas lingkungan hidup meningkat

No.	Nawacita	No.	Prioritas DIY	Prioritas Kota Yogyakarta	No.	Sasaran Kota Yogyakarta
7	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	7	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kinerja aparatur dan birokrasi	12	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
8	Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya					
9	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya				13	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya. Dalam pelaksanaan permenpan tersebut Kota Yogyakarta telah memiliki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai adalah tersedianya bahan bahan untuk koodinasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang yang ingin diwujudkan adalah:

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pengendalian pelaksanaan pembangunan.

3.3. Program dan kegiatan

3.3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN SKPD/UNIT KERJA

Program : Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
2. Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran
3. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/ bangunan kantor
2. Penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan laporan capaian kinerja SKPD

3.3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD

Program : Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda
- b. Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan
- c. Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2017 Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi SKPD/Unit Kerja. Pada tahun 2017 Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan terdapat 4 (empat) program yang terdiri dari kegiatan dengan kebutuhan dana berdasarkan hasil review sebesar Rp 1.673.922.803,-.

Dengan adanya Rencana Kerja Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Yogyakarta, 2016
Kepala Bagian

Wasesa, SH
NIP. 196405061993031009